
**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM TRIDAYA
PEMBANGUNAN MELALUI PENDEKATAN KOMUNIKASI
ANTARPRIBADI**

Kajian Fenomenologis mengenai Konstruksi Realitas Sosial Pemberdayaan
Perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP

By : Rini Rinawati²

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan pemaknaan perempuan mengenai pemberdayaan perempuan, mendeskripsikan tindakan komunikasi yang dilakukan perempuan dalam proses pemberdayaan perempuan, menjelaskan hasil keberdayaan perempuan dan faktor yang menghambatnya, serta cara menyelesaikan hambatan yang ditemui. Kajian penelitian ini dilakukan dalam paradigma interpretif melalui metode fenomenologis. Subjek penelitian terdiri dari 16 orang perempuan sebagai aktivis P2KP yang diambil secara purposive. Wawancara mendalam dan observasi dilakukan dalam penelitian ini untuk menggali data yang diperlukan bagi penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mengkonstruksi proses pemberdayaan sesuai dengan pandangan subjektif mereka, sehingga melahirkan keterlibatan yang berbeda. Terdapat tiga kategori perempuan aktivis P2KP yang menjadi berbeda dalam menampilkan perilaku komunikasinya. Ketiga kategori perempuan tersebut yaitu perempuan religius, perempuan pragmatis, dan perempuan pengabdian. Ketiga perempuan aktivis P2KP tersebut mempunyai pemaknaan yang berbeda mengenai pemberdayaan perempuan yang dilakukan, yaitu pertama, sebagai kegiatan yang memungkinkan adanya kesejajaran antara laki-laki dan perempuan. Kedua, sebagai peran serta atau partisipasi perempuan yang merupakan wujud dari aktualisasi diri perempuan dalam masyarakat. Ketiga, sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat khususnya perempuan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Perempuan mengkonstruksi tindakan komunikasi melalui pesan verbal dan non verbal dengan didasari oleh budaya sunda dan agama islam. Komunikasi silih asih, silih asah, dan silih asuh menjadi cerminan kearifan lokal dari perempuan aktivis P2KP dalam melaksanakan kegiatan

² Penelitian dilakukan dengan bantuan dana dari DIKTI melalui "Hibah Doktor" . Email: rininawati66@yahoo.com

pemberdayaan perempuan. Konstruksi keberdayaan perempuan dipahami sesuai pandangan subjektif perempuan mengenai kondisi perempuan dari tiga sisi, yaitu: adanya peningkatan ekonomi. Kedua, kesejajaran antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pemberdayaan, dan ketiga, adanya tanggung jawab terhadap pekerjaan, jujur, dapat dipercaya, dan adil. Keberdayaan yang diperoleh perempuan sejalan dengan konsep keberdayaan yang dipahami secara subjektif, yaitu adanya kemajuan usaha dari para perempuan sehingga membantu kesejahteraan keluarga, perempuan banyak terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dan dipercaya untuk menempati posisi tertentu dalam kepengurusan. Hambatan yang ditemui perempuan di lapangan tidak mengganggu kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

Kata Kunci: pemberdayaan perempuan, komunikasi, pembangunan.

1. Pendahuluan.

Sejak krisis ekonomi pada tahun 1998 jumlah penduduk miskin terus bertambah yang awalnya berjumlah 21.854.800 jiwa atau hanya 11% dari jumlah penduduk Indonesia (BPS,1997) meningkat menjadi 39,05 juta jiwa atau 17,75% dari jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2006.³ Kemiskinan lebih banyak dialami oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan termasuk untuk daerah Jawa Barat. Peta kemiskinan tahun 2000 yang disusun tim BPS dengan dibantu oleh World Bank yang menunjukkan Jawa Barat merupakan salah satu propinsi yang menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin yang ada di perkotaan lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin yang ada di desa. Jumlah penduduk miskin di kota yang ada di Jawa barat menunjukkan jumlah 19,6%, sedangkan di pedesaan 18,4%.⁴

Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah untuk menekan jumlah penduduk miskin. Salah satu program yang dicanangkan pemerintah adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang pada tanggal 30 April 2007 secara resmi meluncurkan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan gerakan penanggulangan kemiskinan yang menitik-beratkan pada partisipasi masyarakat. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimulai dengan dua program pemberdayaan yang dinilai cukup besar dan efektif yang sudah dilaksanakan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK)

³ Kompas. 18 Juni 2007. Artikel Tyas Retno Wulan. "Feminisasi Kemiskinan dan Upaya Pengentasan".

⁴ Pikiran Rakyat. 14 Oktober 2002. Artikel Sony Herdiana. "Potret Kemiskinan Jawa barat".

yang menjadi dasar bagi pengembangan PNPM di pedesaan, dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang menjadi dasar bagi pengembangan PNPM di perkotaan.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau dikenal dengan PNPM Mandiri P2KP adalah program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun "gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan", yang bertumpu pada nilai luhur dan prinsip universal.⁵

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan PNPM Mandiri P2KP pada dasarnya diarahkan pada perubahan perilaku atau sikap dan cara pandang masyarakat terhadap prinsip pembangunan dengan pemberdayaan manusia seutuhnya. Pemberdayaan yang dilakukan PNPM Mandiri P2KP berusaha meningkatkan tiga daya (Tridaya) yang dimiliki manusia dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya. Tridaya manusia tersebut yaitu daya pembangunan agar tercipta masyarakat yang peduli dengan pembangunan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan, daya sosial agar tercipta masyarakat efektif secara sosial, dan daya ekonomi agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi.

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) meyakini bahwa pendekatan yang lebih efektif untuk mewujudkan proses perubahan perilaku atau sikap masyarakat dalam partisipasinya pada pembangunan adalah pendekatan pemberdayaan atau proses pembelajaran (*edukasi*) masyarakat. Selain itu perlu adanya penguatan kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah dalam mengapresiasi dan mendukung kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan demikian mengantarkan masyarakat ke arah "berdaya atau mampu" sehingga pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan yang ada pada masyarakat tersebut.

Pemberdayaan masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam pembangunan mensyaratkan bahwa seluruh elemen yang ada pada masyarakat ikut terlibat. Pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri P2KP menjadi sebuah proses yang panjang dan bukan sesuatu yang instan. Proses yang dimaksud adalah proses menjadikan masyarakat

⁵ SKS Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. *Pedoman Umum P2KP-3*. Edisi Revisi Mei-2007. Hal 6

mempunyai kemampuan atau kemandirian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarganya atas dasar keputusan atau usaha yang dilakukan.

Perempuan sebagai bagian dari masyarakat menjadi unsur penting dalam proses pembangunan termasuk penanggulangan kemiskinan. Perempuan sebagai bagian terbesar dari kelompok miskin tentunya menjadi potensi besar bagi pembangunan di Indonesia. Pemberdayaan masyarakat dengan dasar pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) telah dilakukan oleh P2KP. Hal ini dapat dilihat dari konsep P2KP yang memandang bahwa perempuan memiliki peran yang amat penting dalam pembangunan, apalagi dari sisi kuantitas perempuan lebih banyak dari laki-laki. Kehadiran P2KP menjadi pembuka “keran” bagi keikutsertaan perempuan secara langsung pada pembangunan melalui pemberdayaan. Konsep P2KP secara tegas menyatakan bahwa perempuan memiliki peran yang amat penting dalam setiap kebijakan yang diambil, baik menyangkut politik, ekonomi, sosial atau bahkan pembangunan lingkungan.

Perempuan sebagai salah satu pihak yang dilibatkan dalam penanggulangan kemiskinan khususnya melalui P2KP akan berinteraksi dengan yang lainnya sebagaimana diisyaratkan oleh model pemberdayaan. Perempuan dengan demikian akan melakukan komunikasi dengan sesama pelaku pemberdayaan itu sendiri, baik itu perempuan lain maupun laki-laki untuk mencapai kesepakatan mengenai berbagai hal dalam proses pemberdayaan pada pembangunan yang dilakukan.

Proses komunikasi dengan demikian akan dilakukan oleh pelaku pemberdayaan masyarakat yang berada dalam kegiatan pemberdayaan (P2KP) tersebut. Komunikasi dan pembangunan memang merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan ibarat mata uang dengan dua sisi. Komunikasi akan menentukan keberhasilan pembangunan, di sisi lain pembangunan akan menentukan arah kegiatan komunikasi dari para pelaku pembangunan sebagaimana dijelaskan oleh model pemberdayaan. Komunikasi yang dilakukan oleh perempuan dalam kegiatan pemberdayaan pada akhirnya akan menentukan makna perempuan tersebut pada konsep pembangunan melalui pemberdayaan. Keikutsertaan perempuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan demikian akan sesuai dengan “makna” atau konstruksi yang ada pada perempuan mengenai pemberdayaan tersebut. Pemaknaan yang dilakukan perempuan mengenai pemberdayaan tersebut pada akhirnya akan menentukan langkah partisipasi yang dilakukan, termasuk kegiatan komunikasi yang terjadi. Bertolak dari fenomena yang telah diuraikan dalam latar belakang penelitian mengenai pemberdayaan perempuan dalam PNPM Mandiri P2KP, maka penulis tertarik untuk

mengkaji masalah “Bagaimana Konstuksi Realitas Sosial Pemberdayaan Perempuan pada program P2KP?”.

2. Landasan Teori

1) Teori Tindakan Sosial

Menurut Weber (2006:268) tindakan sosial adalah perilaku yang diberi makna subjektif oleh individu yang melakukannya. Weber (Mulyana,2001:61) menjelaskan bahwa tindakan manusia itu pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berpikir, dan adanya kesengajaan. Tindakan sosial merupakan tindakan yang disengaja, baik untuk aktor itu sendiri maupun bagi orang lain, di mana pikiran-pikiran aktif saling menafsirkan perilaku orang lainnya, berkomunikasi, dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

Weber melalui karyanya “*The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*” melahirkan pemahaman mengenai hubungan antara gagasan agama dalam hal ini etika protestant dengan semangat kapitalisme yang muncul di dunia barat. Salah satu konsep penting Weber mengenai “tindakan sosial” memberi sumbangan besar bagi ilmu sosiologi khususnya berkenaan dengan proses interaksi yang dilakukan manusia dalam masyarakat. Weber menempatkan konsep tindakan individual sebagai pusat dari masyarakat. Weber mempercayai bahwa hubungan sosial yang menyusun sebuah masyarakat dapat dimengerti melalui tindakan subjektif dari individu sebagai anggota atau bagian dari masyarakat. Tindakan yang dimaksud menurut Weber terdiri dari empat tipe tindakan dasar (rasional), yaitu:

1. Rasionalitas sarana-tujuan, yaitu tindakan yang ditentukan oleh harapan terhadap perilaku objek dalam lingkungan dan manusia lain. Tindakan yang dilakukan sebagai syarat atau sarana untuk mencapai tujuan tentunya berdasarkan perhitungan rasional.
2. Rasionalitas nilai, yaitu tindakan yang ditentukan oleh keyakinan penuh kesadaran akan nilai perilaku etis, estetis, religius.
3. Tindakan afektual, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kondisi emosi dari aktor.
4. Tindakan tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh cara bertindak aktor yang biasa atau lazim dilakukan. (Ritzer & Goodman, 2006: 137)

Menurut Weber tindakan dari seorang individu akan bermakna sosial sejauh tindakan tersebut bermakna subjektif yang diberikan oleh individu.

Weber kemudian memandang bahwa makna subjektif yang diinginkan merupakan komponen kausal (sebab akibat) dari tindakan/atau perilaku manusia yang lain. Tindakan sosial itu pada gilirannya mempertimbangkan perilaku orang lain dan karenanya diorientasikan dalam penampilannya. Tindakan manusia menurut Weber pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berpikir, dan kesengajaan. Tindakan sosial menurut Weber adalah :

Action which 'takes account of the behaviour of others and is thereby oriented in its course'. Social action, then is subjectively meaningful behaviour which is influenced by or oriented toward the behaviour of other (Cuff & Payne, 1981:122)

2) Teori Konstruksi Sosial atas Realitas

Pengagas teori ini adalah Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam bukunya yang berjudul "*The Social Construction of Reality; A Treatise in the Sociology of Knowledge*"(1966). Berger dan Luckmann memahami bahwa konstruksi realitas sosial sebagai teori merupakan suatu kajian teoretis dan sistematis mengenai tindakan manusia sebagai aktor yang kreatif dalam realitas sosialnya. Intisari teori mereka menyatakan "realitas terbentuk secara sosial" dan sosiologi ilmu pengetahuan (*sociology of knowledge*) harus menganalisa proses bagaimana hal itu terjadi. Kajian teori konstruksi sosial menaruh perhatian pada hubungan antara pemikiran manusia dan konteks sosial di mana pikiran tersebut muncul, berkembang, dan dilembagakan.

Berger dan Luckmann mengakui bahwa kita semua mencari pengetahuan atau "kepastian bahwa fenomena adalah riil adanya dan memiliki karakteristik yang khusus" dalam kehidupan kita sehari-hari. Berger setuju dengan pernyataan fenomenologis bahwa terdapat realitas berganda dari pada hanya satu realitas tunggal. Pemberdayaan perempuan dalam P2KP yang akan melahirkan keberdayaan pada dasarnya memiliki makna yang berbeda bagi setiap perempuan, dengan kata lain perempuan akan mengkonstruksi berbeda mengenai realitas keberdayaan sebagai akibat pemberdayaan perempuan. Realitas pemberdayaan perempuan pada akhirnya memiliki realitas ganda. Tindakan sosial manusia yang terjadi setiap hari selalu memiliki makna-makna.

Berger (Sukidin, 2002: 201) memahami bahwa manusia menciptakan kenyataan sosial melalui tiga proses, yaitu : eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri manusia dengan dunia sosio kultural sebagai produk dunia manusia. Proses kedua, objektivasi merupakan interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi. Proses terakhir adalah Internalisasi

yaitu langkah manusia dalam mengidentifikasi diri dengan lembaga sosial atau organisasi sosial tempat individu menjadi anggotanya.

3) Teori Fenomenologi

Fenomenologi sebagai istilah (Muhadjir, 2001: 92) telah digunakan sejak Lambert yang sejaman dengan Kant, juga Hegel dan Peirce. Pada jaman Lambert fenomenologi diartikan sebagai ilusi atas pengalaman. Sementara Kant membedakan istilah fenomena yaitu objek yang kita alami dan noumena yaitu kejadian sebagaimana hal itu terjadi. Hegel memahami bahwa phenomena merupakan tahapan untuk sampai pada noumenon. Pierce berpendapat bahwa phenomenon bukan sekedar memberikan deskripsi objek, melainkan masuk unsur ilusi, imajinasi, dan impian.

Edmund Husserl (1859-1938) merupakan orang yang memperkenalkan filsafat fenomenologi. Husserl memandang bahwa aliran positivistik ternyata tidak mampu mengungkap dunia realitas secara menyeluruh karena hanya melihat pada sebagian fakta dan data di permukaan saja. Husserl menyatakan perlunya pendekatan lain yang mendampingi positivistik dalam memahami realitas kehidupan manusia. Fenomenologi menurut Husserl berangkat dari pemahaman atau pola pikir yang subjektif sehingga dalam memandang realitas tidak hanya dari yang nampak di permukaan, tetapi menggali lebih dalam kepada makna dibalik realitas tersebut.

Fenomonologi selanjutnya dikembangkan oleh Alfred Schutz yang dituangkan dalam karyanya berjudul *The Phenomenology of The Social World* yang banyak diilhami oleh gurunya yaitu Husserl. Fenomenologi yang dipahami Husserl (Sukidin, 2002:33) berangkat dari pola pikir subjektivisme yang tidak hanya memandang dari suatu gejala yang nampak, akan tetapi berusaha menggali makna di balik gejala tersebut. Tindakan manusia pada akhirnya dipahami Schutz sebagai realitas yang didasarkan pada pemahaman atau makna terhadap tindakan tersebut. Oleh karena itu tindakan seseorang oleh Schutz didefinisikan sebagai perilaku yang bermakna subjektif (*subjective meaning*).

Subjektivitas makna seseorang terhadap tindakan yang dilakukannya menurut Schutz bukan hanya ada pada dunia privat atau individual, melainkan sebagai hasil “kebersamaan” makna. Inilah yang oleh Schutz dinamakan sebagai intersubjektif. Sumbangan Schutz (1972;xvii) yang utama bagi gagasan fenomenologi, terutama tentang makna dan bagaimana makna membentuk struktur sosial, adalah “makna” dan “pembentukan makna”. Fenomenologi pada gilirannya mendeskripsikan sejarah dunia

kehidupan, untuk menemukan “endapan makna” yang merekonstruksi realitas perilaku manusia.

4) Teori Interaksi Simbolik

Teori interaksi simbolik sebagai nama diciptakan dan dikembangkan oleh Herbert Blumer yang merupakan murid dari Mead pada tahun 1937 beberapa lama setelah Mead meninggal. Blumer sebagai murid Mead mengembangkan gagasan mengenai interaksi simbolik (West & Turner, 2008:99) berasumsi bahwa terdapat 3 (tiga) pokok pikiran interaksi simbolik, yaitu (1) manusia bertindak terhadap manusia lainnya berdasarkan makna yang diberikan orang lain pada mereka, (2) makna diciptakan dalam interaksi antarmanusia, (3) makna dimodifikasi melalui proses interpretif. Blumer memang tertarik dengan makna yang ada dibalik perilaku yang ditampilkan manusia. Interaksi simbolik berpegang pada pemahaman bahwa manusia membentuk makna melalui proses komunikasi. Makna yang diciptakan manusia membutuhkan proses konstruksi melalui komunikasi yang dilakukan. Makna dengan demikian menurut Blumer merupakan produk sosial atau ciptaan yang dibentuk dalam dan melalui pendefinisian dari perilaku manusia pada saat berinteraksi. Sementara George Ritzer meringkaskan teori interaksi simbolik ke dalam prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Manusia, tidak seperti hewan. Manusia diberkahi dengan kemampuan berpikir.
2. Kemampuan berpikir itu dibentuk oleh interaksi sosial.
3. Dalam interaksi sosial orang belajar makna dan simbol yang memungkinkan mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berpikir.
4. Makna dan simbol memungkinkan orang melanjutkan tindakan (action) dan interaksi yang khas manusia.
5. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas situasi.
6. Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini karena antara lain kemampuan mereka berinteraksi dengan diri sendiri, yang memungkinkan mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian relatif, dan kemudian memilih salah satunya.
7. Pola-pola tindakan dan interaksi yang jalin-menjalin ini membentuk kelompok dan masyarakat. (Mulyana, 2006;73)

5) Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan (perempuan) merupakan salah satu kegiatan dalam kerangka pembangunan partisipatif. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang memungkinkan menumbuhkan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan di suatu kawasan atau lingkungannya. Hal ini sesuai dengan uraian yang dikemukakan oleh Friedmann yang menyatakan bahwa :

”...involves a process of social and political empowerment whose long term objective is to re-balance the structure of power in society by making state action more accountable, strengthening, and making corporate business more socially responsible”. (Pranarka & Prijono, 1996: 58)

Pemberdayaan perempuan pada hakikatnya merupakan jiwa dari gerakan pemberdayaan masyarakat yang menjadi program nasional. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yang disingkat PNPM Mandiri tersebut dalam pelaksanaannya diatur melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007.

Pemberdayaan atau *empowerment* secara konseptual berasal dari kata “*Power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan (Suharto:2006). Pemberdayaan dapat diartikan memberikan kekuasaan atau keberdayaan. Clutterbuck mendefinisikan pemberdayaan sebagai :

Upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan. (Makmur,2008:54)

Memberdayakan perempuan menurut Kartasamita (Hikmat,2006:1) adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat (dalam hal ini perempuan) yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Pemberdayaan perempuan dengan demikian menekankan pada otonomi pengambilan keputusan dari perempuan sebagai kelompok masyarakat, yang berlandaskan pada sumber daya pribadi yang langsung melalui partisipasi, demokratis dan pembelajaran sosial. Hal ini sejalan dengan penjelasan dari McArdle yaitu :

Pemberdayaan merupakan proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui

kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal. (Hikmat,2006:3)

Pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh karenanya harus tepat sasaran dan tujuannya. Sumodiningrat (2000: 109) menjelaskan bahwa sasaran dan tujuan dari pemberdayaan adalah :

1. Meningkatnya peningkatan pendapatan perempuan di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat dibawah garis kemiskinan,
2. Berkembangnya kapasitas perempuan untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif keluarga,
3. Berkembangnya kemampuan perempuan dan meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparatur maupun warga.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan atau paradigma subyektif dengan metode fenomenologi. Metode fenomenologi menjadi pilihan yang digunakan dalam penelitian ini dengan asumsi bahwa fenomenologi merupakan bentuk idealisme yang tertarik pada struktur-struktur dan cara kerjanya kesadaran manusia yang secara implisit meyakini bahwa dunia yang kita alami diciptakan atas dasar kesadaran. Oleh karena itu dalam metode fenomenologi tidak berusaha mencari pendapat dari informan apakah yang dilakukan itu benar atau salah, akan tetapi berusaha “mereduksi” kesadaran informan dalam memahami fenomena perempuan dalam mengkonstruksi proses pemberdayaan yang dilakukannya.

4. Hasil dan Pembahasan.

4.1. Hasil Penelitian

Perempuan yang aktif dalam kegiatan kemasyarakatan khususnya PNPM Mandiri P2KP mempunyai latar belakang sosiodemografi yang berbeda. Oleh karena itu perempuan yang aktif dalam kegiatan PNPM Mandiri P2KP tersebut merupakan orang-orang yang unik yang berbeda satu sama lain. Data sosio demografi informan ini meliputi usia, status pernikahan, agama, dan suku. Data mengenai informan penelitian dari sisi sosiodemografi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Data Informan

NO	NAMA /Inisial	DESA	USIA	SUKU	JML ANK	STATUS	PEKERJ AAN	KEAKTIFAN DI P2KP
1	AR	Padamul ya	50 th	Sunda	3	Menikah	IRT	Anggota KSM Bid. Ekonomi (Anggrek)
2	AW	Padamul ya	42 th	Sunda	3	Menikah	IRT	Koordinator UPS
3	RR	Padamul ya	32 th	Sunda	2	Menikah	IRT	Bagian Sekterariat BKM
4	IC	Padamul ya	42 th	Sunda	3	Menikah	Guru	Manager UPK
5	DS	Padamul ya	56 th	Jawa	4	Menikah	IRT	Anggota KSM Bid Ekonomi (Dahlia)
6	ER	Padamul ya	41 th	Sunda	4	Menikah	IRT	Anggota KSM Bid Ekonomi (Melati)
7	CCN	Padamul ya	38 th	Sunda	1	Menikah	IRT	Anggota KSM Bid Ekonomi (Azalia)
8	MM	Padamul ya	50 th	Sunda	3	Janda	IRT	Anggota KSM Bid Ekonomi (Anyelir)
9	WW	Padamul ya	52 th	Sunda	5	Janda	PNS	BKM (Anggota)
10	IR	Sumbers ari	38 th	Sunda	2	Menikah	IRT	Anggota KSM Bid Sosial (Sabilulungan)
11	EH	Sumbers ari	36 th	Sunda	3	Menikah	IRT	Anggota KSM Lingkungan (Walagri)
12	MR	Sumbers ari	35 th	Sunda	2	Menikah	IRT	Anggota KSM Lingkungan (Walagri)
13	AS	Sarimahi	35 th	Sunda	2	Menikah	Pgawai Desa	BKM (Anggota)
14	RN	Sarimahi	21 th	Sunda	-	Belum	-	BKM (Anggota)
15	EJ	Sarimahi	38 th	Sunda	2	Menikah	IRT	BKM (Anggota)
16	YS	Gunung Leutik	29 th	Sunda	3	Menikah	Wirasw asta	BKM (Anggota)

Sumber : Data Penelitian, 2008 - 2009

4.2. Pembahasan

4.2.1. Eksplorasi Logik, Etik dan Transenden Makna Pemberdayaan Perempuan pada PNPM Mandiri P2KP.

Konseptualisasi atau makna pemberdayaan perempuan merupakan hasil interpretasi perempuan sebelum dan selama proses pemberdayaan perempuan itu berlangsung. Temuan yang diperoleh dari penelitian menjelaskan bahwa terdapat berbagai klasifikasi pemahaman mengenai program pemberdayaan perempuan yang dijalankan oleh PNPM Mandiri P2KP. Tipe pertama adalah **makna ekonomis** yang dimiliki oleh perempuan dengan pandangan bahwa pemberdayaan perempuan adalah program pemerintah untuk membantu perempuan ikut meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Tipe yang ke-dua disebut sebagai **makna partisipatif**. Makna ini dimiliki oleh perempuan yang memandang bahwa pemberdayaan perempuan yang diusung oleh PNPM mandiri P2KP merupakan bentuk keterlibatannya atau peran serta perempuan terhadap pembangunan yang dilakukan di lingkungannya.. Tipe ke-tiga dari pemaknaan yang diberikan perempuan dapat peneliti sebut sebagai **makna gender**. Pemahaman pemberdayaan perempuan sebagai kesejajaran perempuan dengan laki-laki dalam bidang pembangunan menjadi ciri dari perempuan yang memiliki tipe makna gender.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna perempuan mengenai pemberdayaan perempuan diawali oleh sejarah pengetahuan perempuan mengenai PNPM Mandiri P2KP itu sendiri. Pengetahuan awal perempuan aktivis P2KP mengenai program yang dibawa pemerintah yaitu PNPM Mandiri P2KP pada gilirannya menjadi makna subjektif perempuan tersebut dengan meminjam istilah Schutz. Pemaknaan yang diberikan perempuan terhadap konsep pemberdayaan perempuan sebagai program pemerintah yang membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan kesejahteraannya merupakan tipe perempuan pragmatis. Sementara itu kesadaran perempuan mengenai pemberdayaan sebagai kesempatan atau peluang bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi atau berperan serta dalam pembangunan yang dilaksanakan di lingkungannya melahirkan tipe perempuan partisipatoris. Dan kesadaran subjektif perempuan yang memandang pemberdayaan perempuan sebagai kesejajaran perempuan dengan laki-laki dalam bidang pembangunan melahirkan tipe perempuan feminis.

Proses yang dilalui perempuan dalam mengonstruksi pemberdayaan perempuan bila dikaitkan dengan teori yang digunakan seperti dalam kerangka pikir maka sesuai dengan asumsi teori konstruksi sosial Peter

Berger dan Thomas Luckmann. Proses konstruksi sosial atas realitas pemberdayaan perempuan melibatkan proses eksternalisasi, internalisasi, dan objektivasi. Proses eksternalisasi dilakukan perempuan dengan cara ikut dalam sosialisasi pada kegiatan pemberdayaan perempuan PNPM Mandiri P2KP sehingga ada proses pembelajaran dan penyesuaian diri dengan budaya pemberdayaan perempuan di P2KP. Sementara itu proses objektivasi dilakukan perempuan aktivis P2KP melalui cara pelebagaan budaya pemberdayaan perempuan P2KP melalui aturan atau kebijakan yang dikeluarkan baik oleh lembaga P2KP maupun oleh BKM masing-masing. Proses selanjutnya adalah internalisasi yang dilakukan perempuan dengan cara berperan serta atau berpartisipasi dalam kegiatan P2KP. Keterlibatan atau partisipasi perempuan pada kegiatan PNPM Mandiri P2KP dapat disebut sebagai tindakan sosial sebagaimana dipahami oleh Weber. Peran serta perempuan dalam tridaya yang ada pada PNPM Mandiri P2KP menjadikan mereka memiliki kesadaran subjektif (pemahaman) mengenai segala sesuatu pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP tersebut. Proses internalisasi melalui partisipasi perempuan dalam tridaya di PNPM Mandiri P2KP pada dasarnya merupakan tindakan sosial dari perempuan menuju kesadaran subjektif mengenai makna pemberdayaan perempuan yang diikutinya melalui PNPM Mandiri P2KP.

4.2.2. Eksplorasi Logik, Etik dan Transenden Konstruksi Komunikasi yang dilakukan Perempuan dalam PNPM Mandiri P2KP.

Komunikasi yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan proses pertukaran simbol-simbol bermakna. Komunikasi dalam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh PNPM Mandiri P2KP dengan demikian merupakan proses saling bertukar simbol dengan yang lainnya mengenai pelaksanaan pemberdayaan itu sendiri. Komunikasi yang dilakukan perempuan aktivis P2KP dalam kegiatan pemberdayaan perempuan pada PNPM Mandiri P2KP merupakan tindakan intensional. Hal ini memberikan arti bahwa komunikasi yang dilakukan menjadi sebuah tindakan yang mengandung maksud dan makna tertentu. Komunikasi yang dilakukan perempuan aktivis P2KP dari hasil penelitian setelah melalui reduksi data diperoleh klasifikasi proses komunikasi yang dilakukan perempuan aktivis P2KP. Komunikasi yang dilakukan perempuan aktivis P2KP dapat diklasifikasikan dalam dua golongan yaitu komunikasi religi dengan komunikasi moderat. Konsep perempuan yang mengembangkan komunikasi islami ini dikategorikan sebagai perempuan islami.

Konsep perempuan yang sesuai dengan klasifikasi komunikasi moderat yang ditampilkan perempuan dalam kegiatan PNPM Mandiri P2KP dikategorikan sebagai perempuan “permisif”. Perempuan “permisif” yang dimaksud dalam hasil tifikasi ini adalah perempuan yang merasa lebih bebas dalam berkomunikasi, artinya mereka tidak terlalu kaku dengan aturan agama yang mereka anut yaitu agama Islam. Perempuan “permisif” memahami bahwa berinteraksi dengan sesama tidak ada halangan apa-apa selama berada pada koridor yang dibolehkan oleh norma masyarakat dan agama. Pemahaman ini pada akhirnya tampil dalam bentuk perilaku yang tidak memisahkan kegiatan komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di P2KP.

Temuan penelitian menjelaskan adanya implementasi dari nilai-nilai budaya yang ditampilkan dalam berkomunikasi pada kegiatan P2KP. Perempuan aktivis P2KP dalam kegiatan pemberdayaan perempuan mengembangkan komunikasi "*silih asah, silih asih, dan silih asuh*" (saling mempertajam diri, saling mengasahi, dan saling memelihara serta melindungi) dalam pelaksanaan kegiatan P2KP. Hal ini tercermin dari perilaku yang saling bertoleransi dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan seperti bersikap sabar dan saling menghormati di antara para aktivis P2KP.

Komunikasi "*Silih Asah, Silih Asih dan Silih Asuh*" menjadi ciri kearifan lokal dari informan penelitian ketika mereka berinteraksi dengan yang lain pada kegiatan PNPM Mandiri P2KP khususnya dan kehidupan bermasyarakat umumnya. Nilai-nilai budaya sunda yang berkembang pada tatanan kehidupan masyarakat telah meresap dalam kehidupan perempuan aktivis P2KP. Hal ini pada gilirannya tercermin dalam setiap gerak langkah mereka dalam bermasyarakat termasuk dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di PNPM Mandiri P2KP. Budaya Sunda dikenal dengan budaya yang sangat menjunjung tinggi sopan santun. Pada umumnya karakter masyarakat sunda ramah tamah (*someah*), murah senyum, lemah lembut dan sangat menghormati orang tua. Itulah cermin budaya dan kultur masyarakat sunda. Dalam bahasa Sunda bahkan diajarkan bagaimana menggunakan bahasa halus untuk orang tua. Hal inilah yang kemudian tercermin dalam komunikasi keseharian yang dilakukan oleh para perempuan aktivis P2KP

Pameo "*silih asah, silih asih, dan silih asuh*" (saling mempertajam diri, saling mengasahi, dan saling memelihara serta melindungi) menjadi ciri dari urang sunda. Konsep inilah yang kemudian dikembangkan para perempuan aktivis P2KP dalam komunikasi. Komunikasi "*silih asah, silih asih, dan silih asuh*" yang dimaksud oleh para perempuan aktivis P2KP ini adalah komunikasi yang dikembangkan melalui sikap diri pribadi yang

sangat menghormati orang lain dengan cara tenggang rasa untuk menciptakan keserasian hubungan antar sesama, sehingga hubungan yang dekat dan menghargai ini tidak membawa dampak sakit hati atau menyinggung orang lain.

Komunikasi "*silih asah, silih asih, dan silih asuh*" ini terjadi sebagai cerminan pemaknaan yang dipunyai informan terhadap keikutsertaan dalam PNPMM Mandiri P2KP, termasuk juga pemaknaan mengenai konsep pemberdayaan itu sendiri. Perilaku ini sejalan dengan konsep tindakan sosial dari Weber (Mulyana,2001:61) yang menjelaskan bahwa tindakan manusia itu pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berpikir, dan adanya kesengajaan. Tindakan sosial dari perempuan aktivis P2KP ini merupakan tindakan yang disengaja, baik itu untuk perempuan itu sendiri maupun bagi orang lain, dimana pikiran-pikiran aktif saling menafsirkan perilaku lainnya, berkomunikasi dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

Komunikasi "*silih asah, silih asih, dan silih asuh*" yang dikembangkan oleh perempuan aktivis P2KP juga sejalan dengan asumsi dari teori Interaksi Simbolik, yaitu Seseorang menurut teori ini tidak mungkin secara serta merta memberikan reaksi manakala ia memperoleh suatu simbol tanpa melakukan proses berpikir subjektif melalui penilaian dengan cara mendefinisikan dan menafsirkan. Pada akhirnya komunikasi "*silih asah, silih asih, dan silih asuh*" merupakan perwujudan dari konsep "I" dan "Me" yang dikembangkan oleh Mead. Mead (Sukidin,2002:127) memahami bahwa "I" merupakan kecenderungan individu yang spontan tidak terorganisir dan tidak terarah. Sementara "Me" merupakan organisasi diri yang biasa dan menurut adat. Ia memandang sikap orang lain yang dikelola sebagai panduan bagi tingkah laku orang itu. Oleh karena itu kita memasukkan sikap orang lain untuk membentuk kesadaran diri kita sendiri.

Komunikasi "*Silih asah, silih asih, dan silih asuh*" ini menunjukkan karakter yang khas dari budaya religius Sunda sebagai konsekuensi dari pandangan hidup keagamaannya. Pameo *Silih asah, silih asih, dan silih asuh* adalah wujud komunikasi dan interaksi religius-sosial yang menekankan sapaan komunikasi dengan cinta kasih dan merespons cinta kasih tersebut melalui cinta kasih kepada sesama manusia. Dengan kata lain pameo orang sunda ini merupakan kualitas interaksi (komunikasi) yang memegang teguh nilai-nilai ke-Tuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan.

4.2.3. Eksplorasi Logik, Etik dan Transenden Makna Keberdayaan Perempuan pada PNPM Mandiri P2KP.

Pemberdayaan perempuan menjadi program yang dilakukan pemerintah sebagai wujud dari gerakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri P2KP. Gerakan ini merupakan gerakan penanggulangan kemiskinan yang menitik-beratkan pada partisipasi masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh setelah melalui proses reduksi data menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori mengenai konsep keberdayaan perempuan. Kategori pertama makna keberdayaan perempuan adalah makna gender. Perempuan aktivis P2KP yang memiliki makna gender memahami bahwa keberdayaan perempuan berkenaan dengan telah berhasilnya perempuan untuk menjadi sejajar dengan laki-laki, menurut mereka konsep keberdayaan perempuan adalah bahwa perempuan menjadi tidak tergantung kepada laki-laki. Kesejajaran ini diwujudkan dalam partisipasinya pada pembangunan khususnya pada kegiatan PNPM Mandiri P2KP.

Kategori yang kedua dari makna keberdayaan perempuan adalah makna ekonomis. Perempuan aktivis P2KP yang memiliki makna produktif memahami bahwa keberdayaan perempuan berkenaan dengan telah berhasilnya dari sisi ekonomi yaitu adanya kemajuan pada tingkat kesejahteraan perempuan dalam hal pendapatan. Sementara itu kategori yang ketiga dari makna keberdayaan perempuan adalah makna humanis. Perempuan aktivis P2KP yang memiliki makna humanis memahami bahwa keberdayaan perempuan berkenaan dengan konsep diri positif yang dimiliki perempuan. Dalam hal ini perempuan menjadi lebih percaya diri.

Konsep keberdayaan perempuan yang dipahami oleh para informan penelitian memberikan gambaran bahwa perempuan yang berdaya merupakan perempuan yang tidak tergantung kepada laki-laki artinya ada kesejajaran antara perempuan dan laki-laki dalam partisipasinya pada pembangunan khususnya pemberdayaan melalui PNPM Mandiri P2KP. Makna gender yang menjadi kategori dari sebagian perempuan aktivis P2KP mengenai konstruksi keberdayaan perempuan akhirnya melahirkan konsep atau tipe perempuan feminis.

PNPM Mandiri P2KP yang dilakukan dengan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan pada dasarnya berusaha melakukan perubahan perilaku atau sikap khususnya cara pandang masyarakat terhadap prinsip pembangunan. Pembangunan yang dilakukan melalui PNPM Mandiri P2KP adalah pembangunan yang menitikberatkan pada pemberdayaan manusia

seutuhnya. Pemberdayaan sebagai pelaksanaan dari PNPM Mandiri P2KP dengan demikian berusaha meningkatkan tiga daya (Tri Daya) yang dimiliki manusia dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya khususnya bidang ekonomi. Tridaya manusia dalam bidang ekonomi dilakukan agar tercipta masyarakat yang produktif secara ekonomi. Kategori makna ekonomis mengenai makna keberdayaan perempuan sebagaimana dijelaskan pada akhirnya melahirkan konsep atau tipe perempuan produktif.

Konsep atau makna keberdayaan perempuan sebagai makna humanis yang terlihat dari sifat-sifat baik perempuan sebagaimana dipahami perempuan aktivis P2KP pada dasarnya tercermin dalam misi kegiatan PNPM Mandiri P2KP. Misi dari PNPM Mandiri P2KP sebagaimana dijelaskan melalui pedoman pelaksanaannya menggambarkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan harus berpegang pada nilai-nilai universal manusia sebagai berikut:

- a. Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral), yaitu :
 - 1) Jujur;
 - 2) Dapat dipercaya;
 - 3) Ikhlas/kerelawanan;
 - 4) Adil;
 - 5) Kesetaraan;
 - 6) Kesatuan dalam keragaman;
- b. Prinsip-Prinsip Universal Kemasyarakatan (*Good Governance*), yaitu :
 - 1) Demokrasi;
 - 2) Partisipasi;
 - 3) Transparansi dan Akuntabilitas;
 - 4) Desentralisasi;
- c. Prinsip-Prinsip Universal Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya), merupakan prinsip keseimbangan pembangunan, yang dalam konteks P2KP diterjemahkan sebagai sosial, ekonomi dan lingkungan yang tercakup dalam konsep Tridaya. (P2KP, 2007:10)

4.2.4. Eksplorasi Logik, Etik dan Transenden Konstruksi Keberdayaan Perempuan Aktivistis P2KP.

Pemberdayaan yang dilakukan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau mungkin sekelompok orang dalam membuat keputusan-keputusan mengenai hidupnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ife (dalam Suharto,2006:58) yaitu bahwa pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung. Pada

gilirannya keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari keberdayaan masyarakat yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural dan politis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perempuan aktivis P2KP telah mencapai keberdayaannya. Keberdayaan yang diperoleh perempuan aktivis P2KP dapat dilihat dengan telah memanfaatkannya program pembangunan yang diberikan pemerintah melalui P2KP. Adapun program pembangunan tersebut menyangkut “TRIDAYA” yaitu pembangunan di bidang ekonomi, pembangunan di bidang lingkungan atau fisik, dan pembangunan di bidang sosial atau peningkatan sumber daya manusia. Temuan penelitian setelah melalui proses reduksi data diperoleh klasifikasi keberdayaan perempuan yaitu keberdayaan materi dan keberdayaan non materi.

Temuan penelitian menggambarkan bahwa perempuan aktivis P2KP telah memperoleh keberdayaannya sebagai hasil dari proses kegiatan P2KP khususnya di bidang ekonomi. Keberdayaan tersebut ditandai dengan adanya kemampuan perempuan untuk menghasilkan pendapatan yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini sesuai dengan hakikat dari memberdayakan perempuan menurut Kartasmita (Hikmat,2006:1) yaitu upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat (dalam hal ini perempuan) yang berada dalam kondisi tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat. Lima tingkat keberdayaan perempuan sebagai mana disampaikan oleh Titik Hartini yang berdasarkan kerangka analisis gender telah dilakukan oleh perempuan aktivis P2KP khususnya pada tahap tahap kesejahteraan.⁶ Keberdayaan materi yang dicirikan dengan perolehan atau peningkatan pendapatan perempuan dari sisi ekonomi melahirkan tipe atau kategori perempuan adaptor.

Keberdayaan lainnya yang dihasilkan dari proses pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP adalah keberdayaan non materi. Keberdayaan non materi yang diperoleh perempuan aktivis P2KP tidak berupa perolehan pendapatan atau peningkatan kesejahteraan. Keberdayaan non materi yang dimaksud adalah adanya peningkatan pengetahuan, kepuasan dari keaktifan pada kegiatan kemasyarakatan, bahkan kesempatan akses dalam pembangunan. Keberdayaan yang dihasilkan dari proses

⁶ Hartini, Titik. 2006. *Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*. Jurnal Perempuan: No. 50 2007 – hal 81.

pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP dengan ciri tersebut pada akhirnya tipe atau kategori perempuan mediator.

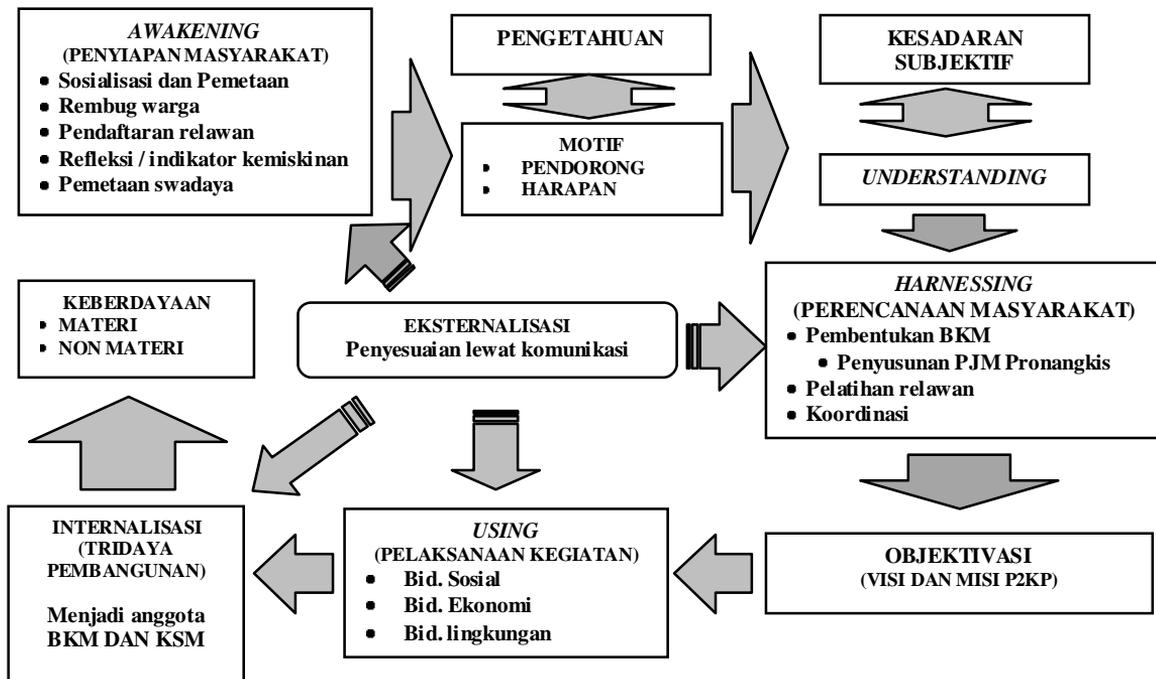
Proses pemberdayaan masyarakat bila dikaitkan dengan penjelasan Wilson akan berkaitan dengan proses *awakening*, *understanding*, *harnessing* dan *using*. Proses penyiapan masyarakat menjadi kegiatan untuk mengetahui program yang masuk termasuk (PNPM Mandiri P2KP) dan mengetahui kondisi lingkungan sendiri yang menurut Wilson disebut sebagai proses *awakening* (proses mengenali dirinya). Pengetahuan yang sudah dipunyai menjadi dasar kesadaran subjektif perempuan kegiatan pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP. Pengetahuan yang diperoleh pada gilirannya akan menentukan *because of motive* (motif pendorong) dan *in order to motive* (motif harapan/tujuan) dari perempuan untuk berpartisipasi pada kegiatan PNPM Mandiri P2KP. Tahapan proses ini pada akhirnya menumbuhkan pemahaman dalam diri perempuan yang oleh Wilson disebut sebagai *understanding*. Proses *understanding* adalah proses pembelajaran perempuan dalam kegiatan pemberdayaan melalui PNPM Mandiri P2KP.

Proses penyiapan masyarakat yang dilanjutkan dengan perencanaan masyarakat menjadikan perempuan memiliki kerbagai pengetahuan termasuk keterampilan melalui pelatihan relawan sehingga perempuan menjadi sadar dengan berbagai kemampuan yang dimilikinya. Proses ini menurut Wilson dinamakan dengan *Harnessing* (kesadaran dengan memiliki keterampilan). Proses pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dalam tridaya pembangunan dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan asumsi Wilson dengan menamakan proses *using*. Proses *using* dipahami oleh Wilson sebagai kegiatan menggunakan keterampilan yang dimiliki untuk memperoleh keberdayaan.

Proses pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP yang pada akhirnya melahirkan keberdayaan dengan melihat pada proses di lapangan dan dikaitkan dengan proses pemberdayaan sebagaimana dipahami oleh Wilson serta teori yang digunakan dapat dilihat pada gambar di atas.

Keberdayaan yang diperoleh perempuan adaptor bila dikaitkan dengan konsep E-V-R (*environment*, *value*, dan *resources*) dari Thompson (dalam Winardi, 2008: 12-15) maka keberdayaan yang diperoleh perempuan merupakan gabungan (kongruensi) ketiga hal tersebut. *Environment* yang ada dalam proses pemberdayaan perempuan di P2KP adalah suasana dari proses pemberdayaan perempuan tersebut. Selanjutnya *value* adalah nilai-nilai yang menjadi landasan pemberdayaan perempuan yang dianut yaitu nilai agama, nilai budaya, termasuk aturan BKM, serta visi dan misi dari P2KP itu sendiri. *Resources* dalam kegiatan pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah perempuan aktivis P2KP itu sendiri yang mempunyai

berbagai keahlian dari sisi pendidikan, pengalaman berorganisasi, dan keterampilan yang diperoleh dari pelatihan selama proses pemberdayaan tersebut.



Gambar 1. Model Pemberdayaan Perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP

4.2.5. Eksplorasi Logik, Etik dan Transenden Konstruksi Hambatan dan Pemecahannya dalam Pemberdayaan Perempuan pada PNPM Mandiri P2KP.

Hambatan atau kendala menjadi faktor yang dialami perempuan aktivis P2KP dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan di P2KP. Temuan penelitian setelah melalui proses reduksi data maka diperoleh dua klasifikasi jenis kendala atau hambatan yang dihadapi oleh perempuan dalam kegiatan P2KP dapat yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal adalah hambatan yang muncul dari dalam diri perempuan aktivis P2KP. Hambatan internal yang dialami oleh perempuan dari hasil penelitian ditemukan adanya kesadaran diri perempuan yang menganggap bahwa perempuan aktivis P2KP kurang mampu dan merupakan manusia berada di bawah laki-laki. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian perempuan aktivis P2KP menganggap dirinya sebagai orang yang memiliki kekurang-mampuan dalam mengelola sesuatu. Hal ini ditunjukkan

dengan kedudukan informan yang hanya sebagai anggota. Kondisi ini disebabkan salah satunya oleh pendidikan dan masih adanya anggapan bahwa laki-laki lebih pantas menjadi pimpinan dibanding dengan perempuan. Dari temuan penelitian ini diperoleh kategori atau tipe perempuan yang memiliki hambatan internal yang diberi konsep perempuan peragu. Pemecahan masalah yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan berbagai keterampilan, kemudian juga melakukan learning by doing, dan sosialisasi serta penerapan dari aturan yang disepakati.

Klasifikasi hambatan kedua yang ditemui oleh perempuan aktivis P2KP pada kegiatan pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP adalah hambatan eksternal. Hambatan atau kendala eksternal yang dihadapi perempuan aktivis P2KP adalah hambatan yang muncul bukan dari dalam diri perempuan aktivis P2KP, melainkan hambatan yang datangnya dari luar. Perempuan aktivis P2KP yang merasakan adanya hambatan eksternal dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP dapat disebut sebagai tipe perempuan pengertian. Pemecahan masalah dilakukan dengan cara pemberian pengertian yang terus menerus, atau melakukan tanggung renteng untuk kemacetan cicilan. Kesabaran menjadi pemecahan bagi reaksi negatif yang ditunjukkan orang lain. Dan prioritas kegiatan ketika perempuan menemui hambatan kekurangan waktu.

5. Kesimpulan

- 1) Pandangan subjektif mendasari pemaknaan mengenai pemberdayaan perempuan sehingga melahirkan keterlibatan yang berbeda. Konstruksi pemberdayaan perempuan yang terbentuk melalui proses eksternalisasi lewat komunikasi, objektivasi nilai dan aturan, dan internalisasi dengan pelaksanaan pemberdayaan pada akhirnya melahirkan tipe perempuan partisipatoris, perempuan pragmatis, dan perempuan feminis.
- 2) Perempuan mengkonstruksi tindakan komunikasi sebagai interaksi simbolik di antara pelaku pemberdayaan melalui simbol verbal dan non verbal. Tindakan sosial perempuan melalui komunikasi antarpribadi dengan pelaku pemberdayaan lainnya didasari oleh budaya sunda dan agama islam. Dari endapan makna sebagai kesadaran subjektif yang dilandasi agama dan budaya sunda pada akhirnya melahirkan kearifan lokal melalui komunikasi “*Silih asah, Silih asih, dan Silih asuh*”.
3. Konsep keberdayaan perempuan dikonstruksi perempuan lewat penyesuaian perempuan dengan budaya PNPM Mandiri P2KP sebagai

eksternalisasi. Kesadaran subjektif perempuan mengenai proses pemberdayaan perempuan diperoleh dengan objektivasi melalui peraturan P2KP dan Kebijakan BKM. Konsep keberdayaan perempuan selanjutnya menjadi proses internalisasi dalam diri perempuan melalui peran sertanya pada PNPM Mandiri P2KP dengan tridaya pembangunannya yaitu bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan atau fisik.

4. Konstruksi keberdayaan perempuan merupakan hasil dari proses pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP. Keberdayaan perempuan terjadi sesuai dengan pengalaman kesadaran subjektif perempuan dalam proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri P2KP yang menghasilkan keberdayaan materi dan keberdayaan non materi.

Konstruksi keberdayaan non materi terjadi setelah adanya kesadaran subjektif perempuan melalui pengalaman keaktifan organisasi. Keberdayaan perempuan sebagai konstruksi realitas dari proses pemberdayaan melalui PNPM Mandiri P2KP dicirikan dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Pelaksanaan pemberdayaan perempuan melalui PNPM Mandiri P2KP dalam proses perjalanannya menemui hambatan-hambatan. Hambatan yang dirasakan perempuan dalam kegiatan pemberdayaan sesuai dengan pengalaman subjektif perempuan yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan internal yang dirasakan perempuan dalam kegiatan pemberdayaan memperlihatkan citra diri perempuan yang sesuai dengan konsep diri selama proses pemberdayaan berlangsung. Hambatan internal yang dirasakan ini melahirkan perempuan peragu mengenai dirinya.

Hambatan eksternal dari perilaku teman dalam pemberdayaan menjadi pengalaman kesadaran subjektif perempuan aktivis P2KP. Perilaku sabar yang ditampilkan sebagai konstruksi kesadaran subjektif mengenai hambatan eksternal ini melahirkan perempuan pengertian.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka & Harry Hikmat. 2003. *Participatory Research Appraisal dalam Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat*. Bandung : Humaniora.
- Alwasilah, A. Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif ; Dasar-Dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Kiblat Buku Utama.
- Anshori, Adang S & Engkos Kosasih & Farida Sarimaya. 1997. *Membincangkan Feminisme ; Refleksi Muslimah atas Peran Sosial Kaum Wanita*. Bandung : Pustaka Hidayah.
- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung : Alfabeta.
- Bachtiar, Wardi. 2006. *Sosiologi Klasik: dari Comte hingga Parson*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Baldwin, John R & Stephen D Perry & Mary Anne Moffitt. 2004. *Communication Theory for Everyday Life*. Boston : Pearson
- Berger, Peter L & Thomas Luckmann. 1990. *Tafsir Sosial atas Kenyataan; Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. Terjemahan Hasan Basari. Jakarta. LP3ES.
- Beilharz, Peter.2005. *Teori-Teori Sosial; Observasi Kritis terhadap para Filosof Terkemuka*. Terjemahan Sigit Jatmiko. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Brooks, Ann. 1997. *Posfeminisme & Cultural Studies; Sebuah Pengantar Paling Komprehensif*. Terjemahan S. Kunto Adi Wibowo. Yogyakarta : Jalasutra.
- Budiman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bungin, H.M Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Creswell, John W. 1998. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*. Amerika : SAGE Publications
- Cuff, E.C & G.C.F. Payne. 1981. *Perspectives in Sociology*. London; George Allen & Unwim.
- Departemen Pemukiman dan Prasarana Wilayah. 2001.a. *Modul Sosialisasi dan Pelatihan Penyusunan RP4D*. Ditjen Perkim. Jakarta
----- . b. *Petunjuk Pelaksanaan Peremajaan Lingkungan Pemukiman Kumuh di Perkotaan dan Pedesaan (dengan konsep Tridaya)*.
- Devito, Joseph A. 1997. *Komunikasi Antarmanusia: Kuliah Dasar*. Jakarta: Professional Books.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum. 2007. *Pedoman Umum P2KP-3*. Edisi Revisi Mei-2007.
- Ekajati, Edi. 1995. *Kebudayaan Sunda; Suatu Pendekatan Sejarah*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Frager, Robert. 2005. *Hati, Diri, dan Jiwa; Psikologi Sufi untuk Transpormasi*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Garna, Judistira. 1995. *Sistem Budaya Indonesia*. Bandung; Program Pascasarjana UNPAD
- Kartono, Kartini. 2006. *Psikologi Wanita 1; Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kusnadi. 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung: Humaniora.
- Kuswarno, Engkus. 2004. *Konstruksi Realitas dan Manajemen Komunikasi Pengemis*. Bandung. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran
----- . 2009. *Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman, dan Contoh Penelitian*. Bandung : Widya Padjadjaran
-

- Liliweri, Alo. 2003. *Perspektif Teoritis Komunikasi Antarpribadi; Suatu Pendekatan ke Arah Psikologi Sosial Komunikasi*. Bandung: PT. Cipta Aditya Bakti.
- Littlejohn, Stephen W & Karen A. Foss. 2005. *Theories of Human Communication; Eighth Edition*. Australia : Thomson – Wadsworth.
- Mulyana, Deddy. 1999. *Nuansa-Nuansa Komunikasi ; Meneropong Politik dan Budaya Komunikasi Masyarakat Kontemporer*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- . 2006. *Metode Penelitian Kualitatif; Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- . 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Paloma, Margaret M. 2007. *Sosiologi Kontemporer*. Terjemahan: Tim Penerjemah Yasogama. Jakarta : PT RajaGrasindo Persada.
- Praja, Juhaya S. 2000. *Tafsir Hikmah; Seputar Ibadah, Muamalah, Jin dan Manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- . 2005. *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika*. Jakarta; Kencana.
- Pranarka, A.M.W & Onny S. Prijono. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Pusat Informasi P2KP. 2007. *Pedoman Umum P2KP-3; Edisi Revisi*. Jakarta. Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum
- Ritzer, George & Douglas J. Goodman. 2006. *Teori Sosial Postmodern*. Terjemahan Muhammad Taufik. Yogyakarta : Juxtapose Research and Publication Study Club kerjasama dengan Kreasi Wacana.
- Schutz, Alfred. 1972. *The Phenomenology of The Social World*. London: Heinemann Educational Book.
- Sukidin, Basrowi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia.

Weber, Max. 2006. *Sosiologi*. Terjemahan: Noorkholis dan Tim Terjemahan Promothea. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

West, Richard & Lynn H. Turner. 2008. *Pengantar Teori Komunikasi; Analisis dan Aplikasi*. Buku 1. Terjemahan: Maria Natalia Damayanti Maer. Jakarta: Salemba Humanika

Winardi. 2008. *Manajemen Perubahan (Management of Change)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group